



Multilateral Meeting

***Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM**

Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah

Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi
Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 31 Agustus 2021



Outline

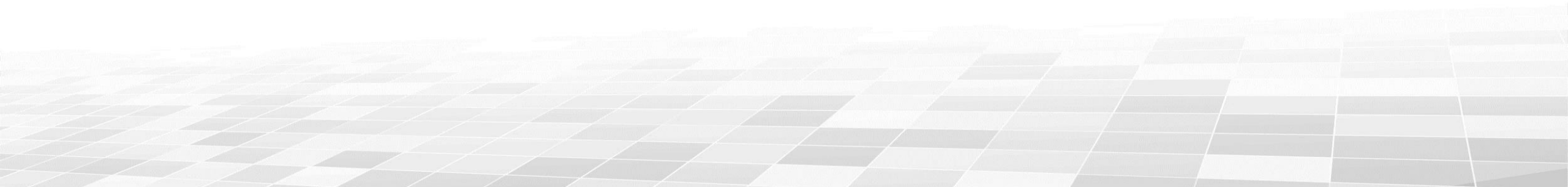
Tujuan Pertemuan

***Summary Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM**

Potensi Intervensi, Tantai Nilai, dan Isu Terkait Komoditas Furniture di Provinsi Jawa Tengah pada *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM

Rincian Output K/L dan Proyek BUMN yang dapat Mendukung Pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM untuk Komoditas Rotan/Kayu di Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Pertemuan





Tujuan Pertemuan



Memperoleh gambaran terkait kondisi terkini dari pengelolaan komoditas dan pengembangan UMKM di setiap lokasi pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM.

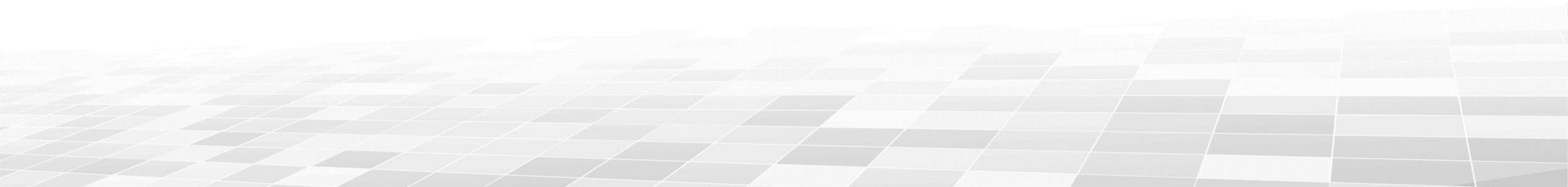


Mendapat informasi terkait kebutuhan intervensi yang masih diperlukan dalam rangka pengelolaan komoditas dan pengembangan UMKM di setiap lokasi pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM.



Menajamkan kembali bentuk komitmen dan memperjelas peran setiap Kementerian/Lembaga dan BUMN yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM di setiap lokasi.

Summary Major Project
Pengelolaan Terpadu UMKM





Pengelolaan Terpadu dalam PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM



Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan melalui:

| | |
|-----------------------|--|
| Pendirian/Legalisasi | <ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran perizinan berusaha2. Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi ekspor3. Fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual |
| Pembiayaan | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses pembiayaan2. Imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga3. Penjaminan kredit modal kerja4. Penyaluran dana bergulir5. Bantuan permodalan6. Bentuk pembiayaan lain |
| Penyediaan Bahan Baku | <ol style="list-style-type: none">1. Membuka akses penyediaan bahan baku/penolong2. Memastikan ketersediaan bahan baku/penolong |
| Proses Produksi | <ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana2. Peningkatan kompetensi SDM3. Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster4. Fasilitasi desain produk dan kemasan, citra produk, desain/konten toko online5. Pembinaan dalam proses fabrikasi produk |
| Kurasi | <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar2. Seleksi dan penilaian terhadap usaha mikro dan kecil |
| Pemasaran Produk | <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan2. Fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri3. Pengembangan kapasitas logistik4. Literasi digital dan nondigital5. Pengembangan aggregator bisnis online |

1. Sarana dan Prasarana:

- a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi
- b. mesin dan peralatan produksi
- c. sarana pendukung lain

2. Peningkatan kompetensi SDM:

- a. pendidikan
- b. pelatihan
- c. magang
- d. pendampingan



Struktur Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM



Outcome/
Impact

1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal meningkat dari 24,33% pada 2019 menjadi 27,80% pada tahun 2022
2. Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada 2019 menjadi 3,00% pada tahun 2022
3. Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,30% pada tahun 2022

Output

1. Produksi nilam meningkat menjadi 379 ton pada tahun 2022 (Aceh)
2. Penggunaan bahan baku rotan meningkat menjadi 12.000 ton pada tahun 2022 (Jawa Tengah)
3. Produksi biofarmaka (jahe) meningkat menjadi 3.410,9 ton pada tahun 2022 (Kalimantan Timur)
4. Produksi daging sapi meningkat menjadi 3701,3 ton di tahun 2022 (NTT)
5. Produksi kelapa meningkat menjadi 264,4 ton pada tahun 2022 (Sulawesi Utara)

Sub-Major
Project

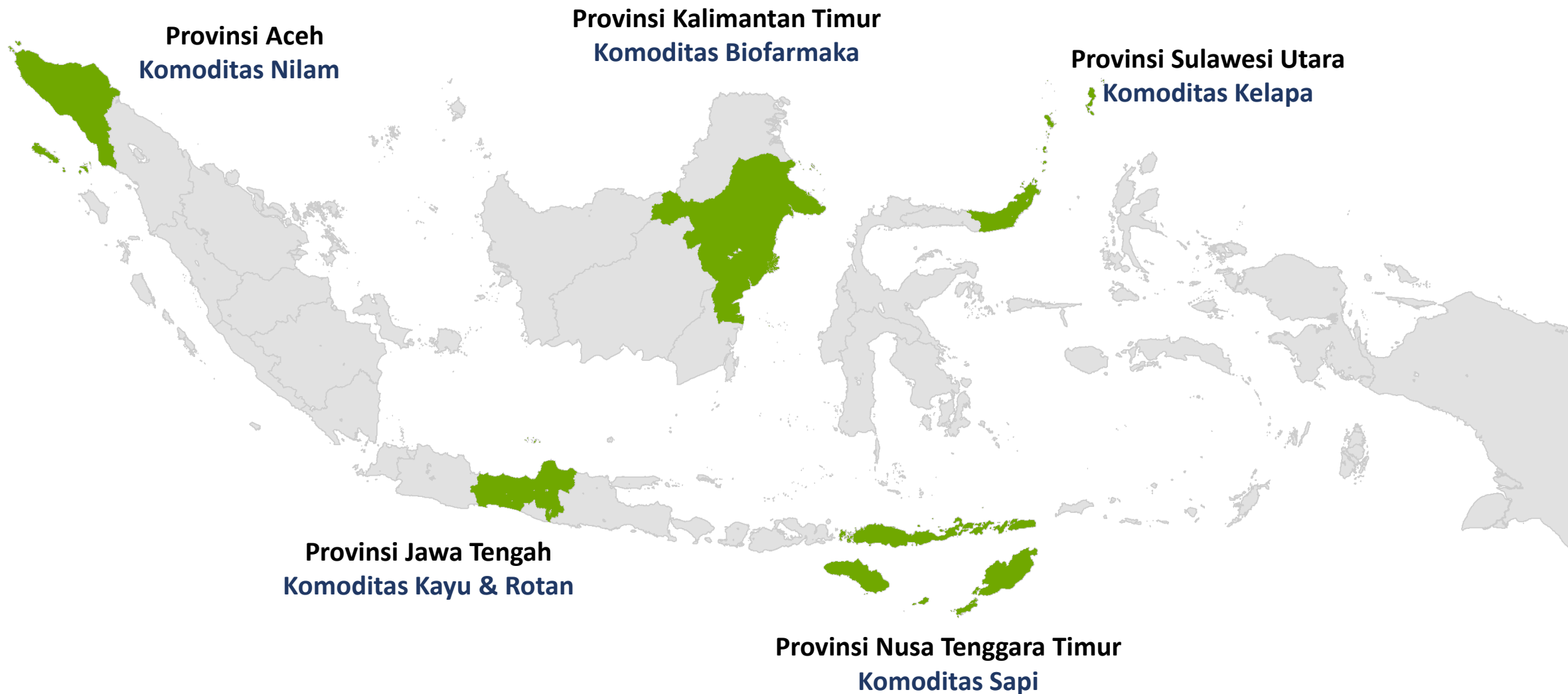


Ruang
Lingkup &
Sub-Ruang
Lingkup

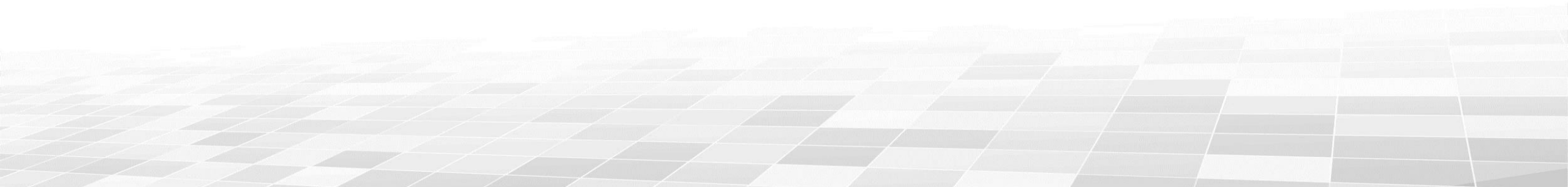




Komoditas dan Lokasi Major Project Pengelolaan UMKM Terpadu Tahun 2022



**Potensi Intervensi, Rantai Nilai, dan Isu Terkait
Komoditas Furniture di Provinsi Jawa Tengah
pada *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM**





Potensi Intervensi dan Isu Komoditas Furniture di Jawa Tengah

Isu dan Permasalahan Rotan

- Tidak ada kepastian ketersediaan bahan baku untuk mebel rotan, sedangkan permintaan tinggi
- Industri mebel rotan banyak yang beralih menjadi industri mebel kayu, sintetis, dll.
- Ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan (Industri pemasok menggunakan rotan tua sedangkan permintaan di Jawa menginginkan rotan muda)
- Keterbatasan kuota ekspor bahan baku
- Bahan baku tidak sesuai dengan harapan industri

Isu dan Permasalahan Kayu

- Bahan baku belum siap pakai
- Pelaku UMKM tidak memiliki industri primer untuk melakukan penggergajian
- Keterbatasan teknologi dalam pengolahan sehingga tidak sesuai standar internasional
- Membutuhkan industri besar untuk melakukan ekspor
- Kemudahan pembiayaan belum terealisasi
- Pelaku usaha belum memahami standar produksi sehingga membutuhkan pendampingan

Masalah utama: Fasilitas Produksi (material/pre-fabrikasi)

Usulan Intervensi: Fasilitas Produksi (Pengeringan dan Gergaji) & Regulasi Bahan Baku dan Eskpor



Rantai Nilai Komoditas Furniture Provinsi Jawa Tengah



- Jawa Tengah
- Komoditas: Furniture
- Lokasi: Jepara, Klaten, Surakarta

Layanan Pendukung:

Lembaga Pembiayaan

Pelaku Pasar

Pemasok | Distributor | Koperasi

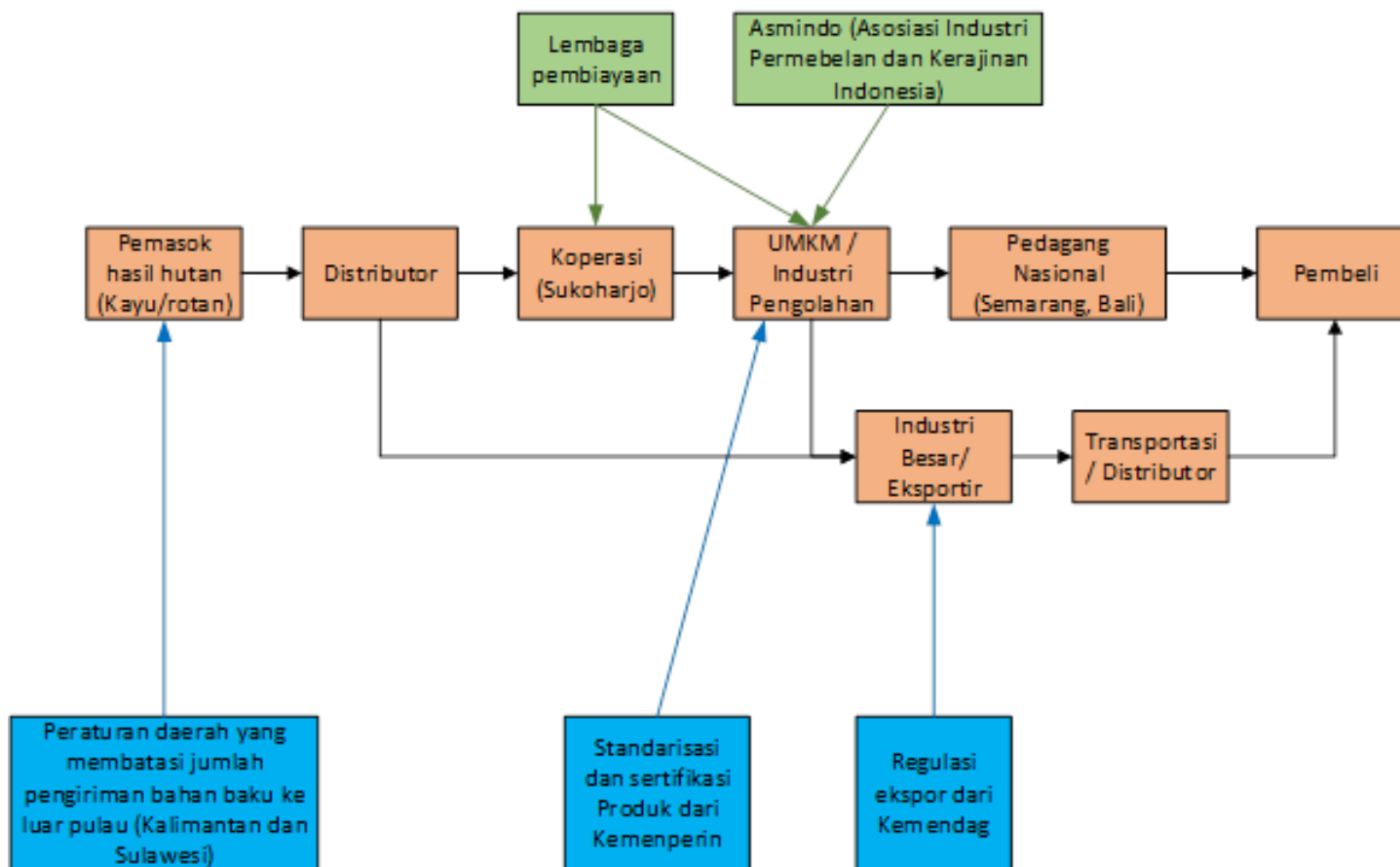
UMKM/Industri Pengolahan | Pedagang Nasional |
Eksportir | Konsumen (Pembeli/Business)

Permasalahan

Bahan baku

Alat produksi (gergaji dan pengering)

Leading sector: Industri Pengolahan





Isu-Isu Komoditas Furniture di Sisi Hilir

Berdasarkan hasil diskusi dengan *buyer* dari Uni Eropa, permasalahan utama ekspor furniture adalah

- ✓ Kapasitas pengangkutan terbatas dengan biaya tinggi
- ✓ Biaya *packing* yang relatif mahal menyebabkan biaya pengiriman membengkak

Solusi dan Tindak Lanjut

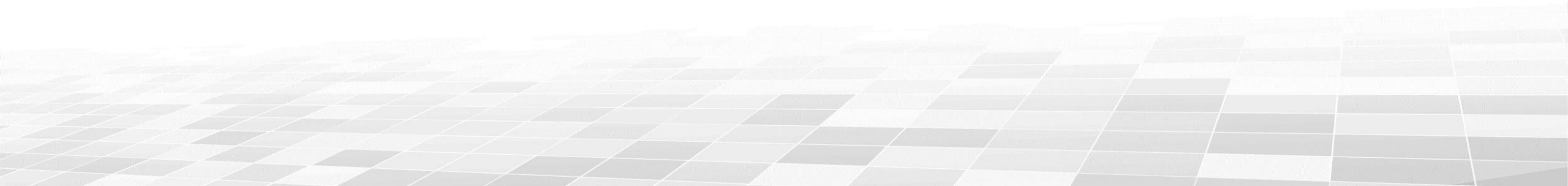


Perlu adanya penghubung antara produsen furniture dengan pasar, khususnya *buyer* dari Uni Eropa dengan cara mempertemukan produsen dengan *buyer*. Dengan program ini diharapkan produsen dan *buyer* saling bertukar kontak sehingga peluang pasar lebih luas.



Perlu adanya alternatif bahan *packing* yang lebih hemat, seperti pemanfaatan sabut kelapa sebagai bahan *packing* yang lebih murah dan ramah lingkungan yang saat ini sudah mulai dikembangkan. Pemanfaatan sabut kelapa sebagai bahan *packing* masih dalam proses pengajuan HAKI.

Terima Kasih



**Rincian Output K/L dan Proyek BUMN yang dapat
Mendukung Pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan
Terpadu UMKM untuk Komoditas Rotan/Kayu
di Provinsi Jawa Tengah**



Kementerian Desa PDTT (1/2)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|-------------------|--------|-------------|--|---------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 1 | Pengembangan BUMDesa | 26.750 | 500 | Badan Usaha | Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah , DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku | Kemendes PDTT | Penyediaan Akses Pembiayaan | Bantuan Permodalan | |
| 2 | Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Bersama | 7.025 | 72 | Badan Usaha | Kabupaten Aceh Timur, Toba, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Musi Rawas, Banyuasin, Tulang Bawang, Mesuji, Pesisir Barat, Bangka Selatan, Karimun, Sukabumi, Magelang, Kendal , Banyuwangi, Pamekasan, Klungkung, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumba Timur, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kotawaringin Barat, Banjar, Barito Kuala, Kutai Timur, Berau, Bulungan, Nunukan, Minahasa Utara, Morowali, Poso, Buol, Tojo Una Una, Sigi, Barru, Bone, Pinrang, Luwu Timur, Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Mamuju, Mamuju Tengah, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Merauke, Nabire, Boven Digoel, Waropen, Kota Jayapura | Kemendes PDTT | Penyediaan Akses Pembiayaan | Bantuan Permodalan | |

Kementerian Desa PDTT (2/2)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 3 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ekonomi | 4.740 | 81 | Kelompok Masyarakat | Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Nias, Toba, Nias Utara, Nias Barat, Kepulauan Mentawai, Bungo, Banyuasin, Tulang Bawang, Mesuji, Bangka Selatan, Karimun, Sukabumi, Magelang, Kendal , Banyuwangi, Pamekasan, Klungkung, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Alor, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Daya, Manggarai Timur, Malaka, Mempawah, Kubu Raya, Paser, Bulungan, Nunukan, Minahasa Utara, Poso, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una Una, Barru, Bone, Wajo, Pinrang, Luwu Utara, Konawe, Konawe Selatan, Wakatobi, Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Sula, Fak Fak, Teluk Wondama, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Merauke, Nabire, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Keerom, Waropen, Nduga, Kota Jayapura | Kemendes PDTT | Penyediaan Akses Pembiayaan | Bantuan Permodalan | |
| 4 | Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 750 | 1 | Kelompok Masyarakat | Pusat | Kemendes PDTT | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |

Kementerian Perindustrian (1/3)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|------------------------|--------|---------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran | 4.900 | 98 | Industri | Pusat | Kemenperin | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitas Pemasaran | |
| 2 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan | 12.500 | 192 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| 3 | Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan | 9.000 | 161 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| 4 | Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas | 8.215 | 14 | Kelompok Masyarakat | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| 5 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran | 2.707 | 44 | Industri | Pusat | Kemenperin | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitas Pemasaran | |
| 6 | Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan | 6.850 | 20 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| 7 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan | 5.500 | 28 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |

Kementerian Perindustrian (2/3)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|-----------------------|--------|------------------|---|----------------------------------|---|
| 8 | Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitas | 3.500 | 8 | Kelompok Masyarakat | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| 9 | Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 2.000 | 50 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Desain Produk dan Kemasan | |
| 10 | Layanan Desain dan Kemasan | 2.000 | 100 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Desain Produk dan Kemasan | |
| 11 | IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM | 1.500 | 1000 | Industri | Pusat | Kemenperin | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |
| 12 | Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL)) | 1.650 | 300 | Orang | Pusat | Kemenperin | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 13 | Pengembangan Sektor Industri Aneka | 5.633 | 2 | Rekomendasi Kebijakan | Pusat | Kemenperin | Regulasi dan Pendataan UMKM | Regulasi KUMKM | |
| 14 | Dukungan Penumbuhan Wirausaha Baru dan Pengembangan IKM di Lingkungan Pondok Pesantren | 689 | 9 | Industri | Pusat | Kemenperin | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Pembinaan Fabrikasi Produk UMK | |

Kementerian Perindustrian (3/3)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|----------|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 15 | IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitas Esmart IKM | 1.500 | 1.000 | Industri | Pusat | Kemenperin | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |

Badan Standarisasi Nasional

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|----------------------|--------|---------|--------|------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | Bimbingan teknis kepada UMKM | 1.465 | 200 | UMKM | Pusat | BSN | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |
| 2 | Sosialisasi kepada Penerap Standar Nasional Indonesia | 1.098 | 3000 | Orang | Pusat | BSN | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |
| 3 | Bimbingan Teknis Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian | 917 | 30 | Lembaga | Pusat | BSN | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Mahasiswa menjalankan wirausaha | 24.849 | 3000 | Mahasiswa | Koordinasi Pusat | Kemendikbudristek | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 2 | SMK yang Mengembangkan Pendidikan Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 22.090 | 240 | Lembaga | Pusat | Kemendikbudristek | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |
| 3 | Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha | 90.543 | 16676 | Orang | Pusat | Kemendikbudristek | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |

Kementerian Komunikasi dan Informatika

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|-------------------------------|-------------------|--------|--------|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Adopsi teknologi digital UMKM | 35.000 | 7000 | UMKM | 10 Kawasan Pariwisata Prioritas: Malang (Jawa Timur), Surakarta dan Semarang (Jawa Tengah), Karo (Sumatera Utara), Yogyakarta (DI Yogyakarta), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur), Bangka Belitung, Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), Minahasa (Sulawesi Utara) | Kemenkominfo | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Agregator Bisnis Online | |

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|-------------------|--------|------------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---|
| 1 | Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan | 2.650 | 11.000 | Orang | Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara | KPPPA | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 2 | SDM pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang KGPA | 700 | 1.800 | Orang | Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara | KPPPA | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 3 | Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan | 500 | 15 | Daerah (Prov/Kab/Kota) | Aceh, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah , Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara | KPPPA | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |

Kementerian Pemuda dan Olahraga

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|----------------------|--------|--------|-------------|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| 1 | Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan | 4.500 | 300 | Orang | 34 Provinsi | Kemenpora | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |

Kementerian Ketenagakerjaan

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|-------------------|--------|--------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Tenaga Kerja Mandiri Pemula | 200.000 | 40.000 | Orang | 34 Provinsi (Pusat) | Kemenaker | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 2 | Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Pemula | 80.000 | 40.000 | Orang | 34 Provinsi (Pusat) | Kemenaker | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 3 | Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan | 27.000 | 1.800 | Orang | 34 Provinsi (Pusat) | Kemenaker | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| 4 | Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan | 6.570 | 1.800 | Orang | 34 Provinsi (Pusat) | Kemenaker | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|---------------------|---|------------------|-----------------------|--|---|
| 1 | Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha | 2.450 | 1.200 | Orang | Kota Pematang Siantar (150), Kota Pekanbaru (150), Kab. Bogor (150), Kab. Majalengka (150), Kota Bogor (150), Kota Kupang (150), Kota Samarinda (150), Kota Makassar (150) | KLHK | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |
| 2 | Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum | 8.400 | 42 | Kelompok Masyarakat | Kab. Lima Puluh Kota (1), Kab. Kerinci (1), Kab. Musi Rawas (1), Kab. Lampung Barat (4), Kab. Bandung Barat (1), Kab. Blitar (5), Kab. Jembrana (2), Kab. Ngada (6), Kab. Ketapang (1), Kab. Kapuas Hulu (5), Kab. Hulu Sungai Tengah (1), Kab. Bantaeng (1), Kab. Barru (1), Kab. Sidenreng Rappang (5), Kab. Kepulauan Aru (1), Kab. Seram Bagian Barat (2), Kota Ambon (1), Kab. Halmahera Barat (2), Kota Ternate (1) | KLHK | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |

Kementerian Agama

| NO | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Sertifikat Halal Non UMK | 6.950 | 7.970 | Produk/Sertifikat | Pusat | Kemenag | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |
| 2 | Sertifikat Halal UMK | 25.050 | 25.000 | Produk/Sertifikat | 34 Provinsi | Kemenag | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |



Kementerian Pertanian

| No | RO | Alokasi (Rp Juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--------------------------------|----------------------|--------|------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Wirausahawan Muda Pertanian | 21.620 | 765 | Kelompok Masyarakat | Kota Medan, Kab. Banyuasin, Kota Bogor, Kab. Magelang , Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kab. Tangerang, Kab. Kupang, Kota Banjarbaru, Kab. Gowa, Kab. Manokwari | Kementan | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |

Kementerian Perdagangan

| No | RO | Alokasi (RP juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|-------------------|--------|-------------|---|---------------|--|--|---|
| 1 | Fasilitasi Pengembangan Merek | 1.000 | 25 | Badan Usaha | Belum ditentukan | Kemendag | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |
| 2 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 750 | 200 | Badan Usaha | Belum ditentukan | Kemendag | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |
| 3 | Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor | 3.250 | 40 | Badan Usaha | Belum ditentukan | Kemendag | Kurasi dan Standardisasi Produk | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi | |
| 4 | Pengembangan Desain melalui Indonesian Design Development Center | 4.500 | 100 | Produk | Jakarta | Kemendag | Kurasi dan Standardisasi Produk | Kurasi Produk Unggulan | |
| 5 | Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar | 5.000 | 1500 | UMKM | 5 Provinsi (Pusat) | Kemendag | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| 6 | Promosi Makanan dan Minuman Sehat Nusantara | 5.000 | 1 | Promosi | Jakarta | Kemendag | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |
| 7 | Export Coaching Program | 6.329 | 300 | UKM | Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Mataram, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Pontianak, Serang | Kemendag | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |
| 9 | Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan | 10.000 | 500 | UMKM | 20 Provinsi (Pusat) | Kemendag | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |
| 12 | Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan | 2.000 | 1.000 | UMKM | 6 Provinsi (Pusat) | Kemendag | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|----------------------|--------|-------------|--------|-------------------|--|-----------------|---|
| 1 | Kemitraan Usaha Nasional | 8.000 | 25 | UMKM | Pusat | Kemenves/ BKPM | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| 2 | Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM | 27.000 | 70 | Badan Usaha | Pusat | Kemenves/ BKPM | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|-------------|--------|------------------|--|-----------------|--|
| 1 | 003 – Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan | 218 | 1 | Perkara | Pusat | KPPU | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| 2 | 002 - Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha | 307 | 2 | Badan usaha | Pusat | KPPU | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |

Kementerian Perhubungan (1/3)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|--------|------------------------------|------------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV (Termasuk Supervisi) | 32.500 | 1 | Unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 2 | Rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Likupang - Prioritas Nasional | 39.326 | 1 | Unit | Provinsi Sulawesi Utara | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 3 | Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo Kab. Ende - Prioritas Nasional | 15.000 | 1 | Unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 4 | Pengembangan Bandar udara H Hasan Aroeboesman - PN | 100.000 | 1 | unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 5 | Pengembangan Bandar Udara umbu Mehang Kunda - PN | 80.500 | 1 | unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 6 | Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda Tahap III - PN | 100.000 | 1 | unit | Provinsi Kalimantan Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |

Kementerian Perhubungan (2/3)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|----------------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---|
| 7 | Pembangunan Bandar Udara Bolaang Mongondow - PN | 121.000 | 1 | unit | Provinsi Sulawesi Utara | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 8 | Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh - PN | 16.725 | 1 | unit | Provinsi Aceh | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 9 | Pengembangan Bandar Udara Dewadaru | 50.000 | 1 | unit | Provinsi Jawa Tengah | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 10 | Pengembangan Pelabuhan Laut Seba | 52.000 | 1 | unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 11 | Pembangunan Fasilitas pelabuhan Laut Tahuna | 2.700 | 1 | unit | Provinsi Sulawesi Utara | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 12 | Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang | 25.000 | 1 | unit | Provinsi Sulawesi Utara | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |

Kementerian Perhubungan (3/3)

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|---|----------------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---|
| 13 | Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pulau Banyak | 19.000 | 1 | Unit | Provinsi Aceh | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 14 | Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Atapupu | 83.500 | 1 | Unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |
| 15 | Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Baa | 15.000 | 1 | unit | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kemenhub | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Kapasitas Logistik | |

Proyek Badan Usaha Milik Negara

| No | RO | Alokasi (Rp juta) | Target | Satuan | Lokasi | K/L Pelaksana | Ruang Lingkup | Bentuk Kegiatan | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|----|--|----------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Pengembangan Aplikasi Warung Pangan untuk UMKM | 50.200 | | | | BGR | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |
| 2 | Penjaminan KUR UMKM-K | 3.500.000 | | | | BPUI, Jamkrindo, Askrindo | Penyediaan Akses Pembiayaan | Bantuan Permodalan | |
| 3 | Telkom Digital Venture | 7.500.000 | | | | Telkom | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |



Kementerian Koperasi dan UKM (1/19)

Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|---|---|--|----------------------|---|
| 044.EB | 4442.QDF | 002-Koperasi yang difasilitasi melakukan kemitraan | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| | | 003-Koperasi yang dikembangkan Jaringan Usahanya | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |
| | | 004-Korporatisasi Petani dan Nelayan Melalui Koperasi | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |



Kementerian Koperasi dan UKM (2/19)

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------|--|---|
| 044.EB | 5615.SCF | 001- Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang diberikan Pelatihan | Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |



Kementerian Koperasi dan UKM (3/19)

Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| 044.EB | 2746.QDF | 001-Koperasi yang mendapatkan Dukungan Permodalan dan Penjaminan | Pusat, Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |
| | | 002-Koperasi yang mendapatkan akses dan skema pembiayaan | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kab. Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |



Kementerian Koperasi dan UKM (4/19)



Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah (1/2)

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 044.EB | 2751.QDG | 001-Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk | Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| | | 002-UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Kupang, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Pengembangan Agregator Bisnis Online | |
| | | 003-Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat | Pusat | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |
| | | 004-Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk | Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Asia Pasifik | Kurasi dan Standardisasi Produk | Kurasi Produk Unggulan | |



Kementerian Koperasi dan UKM (5/19)



Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah (2/2)

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|---|---|--|-------------------|---|
| 044.EB | 2751.QDJ | 001-Kemitraan Usaha Startup yang diperluas dan dibentuk | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |



Kementerian Koperasi dan UKM (6/19)



Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|---|--|--|----------------------|---|
| 044.EB | 2739.QDG | 001-Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| | | 002-Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan | Kab. Aceh Besar , Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi Jawa Timur, Kota Kupang , Kota Balikpapan , Kab. Minahasa Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Kemitraan Usaha | |
| | | 003-Skema/Sistem Jaringan Pemasaran untuk 10 Kelompok/Klaster Usaha Mikro | Kab. Aceh Besar , Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi Jawa Timur, Kota Kupang , Kota Balikpapan , Kab. Minahasa Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |
| | | 004-Usaha Mikro yang difasilitasi perluasan jangkauan pemasaran melalui e-commerce | Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan | Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan | Fasilitasi Pemasaran | |



Kementerian Koperasi dan UKM (7/19)



Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah

| Kode Program | Kode Kegiatan /KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| 044.EB | 2763.QDJ | 001-Start-Up yang difasilitasi Akses Investasi | Provinsi Aceh , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |
| | 2763.QDG | 001-UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan | Provinsi Aceh , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Sulawesi Utara | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |
| | | 002-UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak | Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |



Kementerian Koperasi dan UKM (8/19)

Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| 044.EB | 2764.SAA | 001-UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika | 34 Provinsi | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |
| | 2764.SBE | 001-UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi | Provinsi Aceh , Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Maluku, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Selatan | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |
| | | 002-Pembina Aparatur / Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya | Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| | 2764.SCC | 001-UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif | Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |
| | 2764.SCF | 001-UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis | Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku | Pendampingan SDM UMKM | Literasi Digital dan Non-Digital | |



Kementerian Koperasi dan UKM (9/19)



Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|---------------|-------------------|---|---|-----------------------|--|---|
| 044.EB dan WA | 4445.QDG | 001-USaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan | Kab. Aceh Besar , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Kota Kupang , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan , Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua. | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |
| | | 002-Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha | Kab. Aceh Besar , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Balikpapan , Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |
| | | 003-Kelompok/Klaster Usaha Mikro mendapatkan fasilitasi Standardisasi Kompetensi SDM Usaha Mikro | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Kota Kupang , Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/Training | |



Kementerian Koperasi dan UKM (10/19)



Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|
| 044.EB | 4451.QDG | 001-Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk | Bali, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, NTB (per Renja awal) | Kurasi dan Standarisasi Produk | Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi | |



Kementerian Koperasi dan UKM (11/19)



Sekretariat Deputy Bidang Usaha Mikro

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|---|
| | 4942.PEA | 001- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Program | Pusat | Regulasi dan Pendataan UMKM | Pendataan KUMKM | Dihapus dari tagging MP |



Kementerian Koperasi dan UKM (12/19)



LPDB-KUMKM

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|---|
| 044.EB | 2779.QAF | 001-Koperasi Penerima Dana Bergulir | Pusat | Penyediaan Akses Pembiayaan | Dana Bergulir Pemerintah | |
| | 2779.EBD | 003-Layanan Perencanaan, Pelaporan dan Sosialisasi | Pusat | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |



Kementerian Koperasi dan UKM (13/19)



Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| 044.EB | 4446.Q DG | 001-USaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) | Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |
| | 4446.U BA | 001-Pemerintah Daerah yang mendapatkan pembinaan dalam Pengembangan Usaha Mikro | Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |



Kementerian Koperasi dan UKM (14/19)



Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah

| Kode Program | Kode Kegiatan /KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|--------------------|---|--|---|---|---|
| 044.EB | 4450.PBF | 001-Kebijakan sarana dan prasarana Factory Sharing UKM yang direkomendasikan | Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat | Regulasi dan Pendataan UMKM | Regulasi KUMKM | |
| | 4450.QDG | 001-UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok | Kab. Aceh Besar , Provinsi Jawa Barat, Kab. Subang, Kab. Klaten , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan , Provinsi Sulawesi Selatan | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| | | 002-UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk | Kab. Aceh Besar , Kab. Subang, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/ Training | |
| | 4450.QDJ | 001-Start-Up yang diperluas rantai pasok | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Pendampingan SDM UMKM | Sertifikasi melalui Pelatihan/ Training | |
| | 4450.RAI | 001-UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Factory Sharing | Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |



Kementerian Koperasi dan UKM (15/19)



Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis

| Kode Program | Kode Kegiatan/KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-------------------|--|--|-----------------------|------------------------|---|
| 044.EB | 4454.QDB | 001-Dunia Pendidikan, Industri dan Usaha yang diperkuat Perannya di Bidang Kewirausahaan | Pusat, Kab. Aceh Besar, Kab. Klaten, Kota Kupang, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Selatan | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |



Kementerian Koperasi dan UKM (16/19)



Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha

| Kode Program | Kode Kegiatan/ KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|-----------------------|---|--|-----------------------------|--|--|
| 044.EB | 4455.QDC | 001-Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif | Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |
| | | 002-Wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang Pembiayaan | Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua | Penyediaan Akses Pembiayaan | Fasilitasi Pendampingan Akses Pembiayaan | |



Kementerian Koperasi dan UKM (17/19)



Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

| Kode Program | Kode Kegiatan/K RO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|--------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| 044.EB | 2757.QDC | 001-Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara | Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama | Sarana dan Prasarana Produksi | |
| | | 002-Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya | Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |



Kementerian Koperasi dan UKM (18/19)



Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Wirausaha

| Kode Program | Kode Kegiatan /KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|--------------------|---|---|-----------------------|------------------------|---|
| 044.EB | 4456.QD B | 001-Lembaga Inkubator Wirausaha yang dikembangkan | Pusat, Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |
| | 4456.QD J | 001-Startup yang di fasilitasi inkubasi | Pusat, Provinsi Aceh , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah , Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTT , Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur , Provinsi Sulawesi Utara , Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan | Pendampingan SDM UMKM | Pendampingan Wirausaha | |



Kementerian Koperasi dan UKM (19/19)



Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha

| Kode Program | Kode Kegiatan /KRO | RO | Lokasi per KRISNA Renja (per 3 Agustus 2021) | Ruang Lingkup | Sub-Ruang Lingkup | Catatan pada Serial Meeting MP Pengelolaan Terpadu UMKM di Provinsi Jawa Tengah (31 Agustus 2021) |
|--------------|--------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|---|
| 044.EB | 4457.QM A | 001-Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM | Pusat | Regulasi dan Pendataan UMKM | Pendataan KUMKM | |

End of Document



Skema Pelaksanaan Studi Awal Pengelolaan Terpadu UMKM

Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian Koperasi dan UKM

-----> Output Kajian sebagai masukan untuk



Tahapan saat ini



Kemajuan Tahapan Kajian Tiap Lokasi *Major Project*

| Lokasi | Komoditas | Desk Study | Survei & Pemetaan | Verifikasi Studi (M2-M4 Agustus) | Perencanaan Intervensi (Oktober) | Keterangan |
|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Sulawesi Utara | Kelapa | V | V | X | X | Finalisasi hasil survei dan analisis |
| NTT | Sapi | V | V | X | X | Sedang berjalan, masih dilakukan survei |
| Jawa Tengah | Kayu/Rotan | V | X | X | X | Survei oleh <i>local enumerator</i> terkendala kebijakan PPKM |
| Kalimantan Timur | Biofarmaka | V | V | X | X | Pemetaan selesai, sedang dianalisis |
| Aceh | Nilam | V | X | X | X | Survei oleh <i>local enumerator</i> akan dimulai pada minggu ke-2 Agustus |

Diperlukan informasi kemajuan pelaksanaan penyiapan *major project* oleh Kementerian KUKM

- Tim Koordinasi Pengelolaan Terpadu UMKM di KemenKUKM
- Sekretariat Pengelolaan Terpadu
- Kajian Kelayakan di tiap lokasi
- Penyusunan DED, dan sebagainya.

Referensi Dokumen yang Tersedia

- Kajian Kelayakan Usaha Melalui Kemitraan Strategis Komoditas Biofarmaka di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (2021)
- Kajian Identifikasi Potensi Pengembangan Kemitraan Strategis pada Komoditas Sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (2019-2020)
- Kajian Identifikasi Praktik Baik Kemitraan Strategis di Indonesia (2018-2019)